



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSU NUR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 427723

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	710.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	166.800.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 28D ALL115S/MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, HONDA HONDA PCX / V1J02Q32L1 A/T DIBELI SECARA KREDIT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 32.800.000		
4. MOTOR, HONDA METIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.781.157
F. HARTA LAINNYA	Rp.	402.299.924
Sub Total	Rp.	1.370.881.081



III. HUTANG

Rp. 459.966.572

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 910.914.509

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.